



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 13434-13444

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Procedural Justice, Stigma Teroris Terhadap Komunitas Muslim Di Australia

Voni Sri Wijayanti

Universitas Katholik Parahyangan

Email: vonisw@gmail.com^{1✉}

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti stigma teroris terhadap komunitas Muslim di Australia, yang sering kali terjadi pada Muslim sebagai kaum minoritas. Bagaimanapun, Australia dikenal kuat sebagai negara secular dan multicultural demokratis yang sekarang menghadapi isu ini sejak lama. Pemerintah Australia telah melakukan yang terbaik untuk melindungi warga negaranya termasuk kaum Muslim sebagai bagian dari komunitas social. Bahkan, mereka juga telah meratifikasi Pasal 18 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, untuk melindungi warganya. Faktanya, diskriminasi terhadap muslim oleh kaum mayoritas khususnya komunitas muslim masih sering terjadi. Menciptakan stereotip tentang muslim yang berpotensi untuk menjadi teroris, dikarenakan symbol dari islam dan beberapa serangan teroris disana. Setelah serangan terroris 9/11, banyak negara barat yang memperkuat hokum anti-terror-nya. Hal itu melemahkan proteksi terhadap minoritas muslim di lingkungan barat, mereka diharuskan untuk mematuhi prosedur yang berlaku sedangkan mereka juga di marginalisasi dari lingkup social. Maka dari itu, bagaimana stigma ini dapat terjadi kepada minoritas muslim di Australia? Bagaimana situasi ini bias menyebabkan marginalisasi terhadap komunitas muslim disana? Pertanyaan ini akan dijawab menggunakan teori procedural justice, untuk menganalisa mengapa kebanyakan Muslim disana merasa termarginalisasi oleh hukum dan lingkungan sosialnya. Untuk memberikan data dalam penelitian akan menggunakan metode kualitatif, sumber akan didapatkan dari sumber sekunder seperti buku, jurnal artikel, dan penelitian terkait.

Kata kunci: *Stigma, minoritas Muslim di Australia, Teroris, Procedural Justice*

Abstract

This research examines the stigma of terrorists against the Muslim community in Australia, which often occurs in Muslims as a minority. After all, Australia is known strongly as a secular and multicultural democratic country that has now faced this issue for a long time. The Australian government has done its best to protect its citizens, including Muslims, as part of the social community. In fact, they have also ratified Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights, to protect their citizens. In fact, discrimination against Muslims by the majority, especially the Muslim community, is still common. Creating stereotypes about Muslims who are potential terrorists, because of the symbol of Islam and some terrorist attacks there. After the 9/11 terrorist attacks, many western countries strengthened their anti-terror laws. This weakens the protection of Muslim minorities in the West, they are required to abide by procedures while they are also marginalized from the social sphere. So how does this stigma apply to Australia's Muslim minority? How can this situation lead to the marginalization of the Muslim community there? This question will be answered using procedural justice theory, to analyze why most Muslims there feel marginalized by the law and social environment. To provide data in research will use qualitative methods, sources will be obtained from secondary sources such as books, journal articles, and related research.

Keywords : *Stigma, Muslim minorities in Australia, Terrorists, Procedural Justice*

PENDAHULUAN

Australia dikenal sebagai negara yang multikultur, secular, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pemerintah juga telah meratifikasi Pasal 18 PBB tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Memberikan jaminan bagi seluruh warganya untuk mendapatkan hak yang sama sebagai bagian dari komunitas sosial dan makhluk hidup. Begitupun bagi penganut agama apapun yang telah di akui di Australia, berhak untuk menjalankan aktivitas beragama dengan bebas (Nations, 1948). Namun, sebagai kaum minoritas, Muslim di negara ini masih terdapat beberapa yang mengalami ketidakadilan sosial. Seperti termarginalisasikan dan munculnya beberapa stigma bahwa muslim sangat lekat kaitannya dengan terroris. Kejadian ini memang tidak secara terang-terangan dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi oleh kebanyakan aktor politik yang berada dalam lingkaran agama mayoritas disana khususnya Kristiani (Arifin et al., 2019).

Sementara itu, pasca kejadian 9/11 banyak negara barat yang beraliansi untuk memerangi kejahatan terrorisme baik di dalam ataupun di luar teritorialnya. Ternyata, banyak ahli dan analisis yang menyatakan bahwa, prosedur ini yang ternyata justru memarginalkan suatu kaum khususnya Islam. Ketika agama ini sering dipandang sebagai pemicu dari berbagai aksi terror yang terjadi (McCulloch, 2003). Contohnya di Australia, ketika kebanyakan aksi terror yang terjadi dilakukan oleh berbagai background pelaku dari negara Timur Tengah dan beragama Islam (Arifin et al., 2019). Beberapa kasus plot teroris

yang pernah terjadi sebagai berikut ini. Di tahun 2014, 15 orang ditahan terkait dengan perencanaan terror oleh Omarjan Azeri dan Mohammad Baryaelei (Misra, 2018). Masih di tahun yang sama terdapat aksi terror yang menggemparkan, Lindt Café Siege yang diserang oleh Haroon Monis berkewarganegaraan Iran, menyandera 18 orang selama 17 jam dan membunuh 2 orang (BBC News, 2014). Di tahun 2015, dua remaja berusia 16 dan 17 tahun ditahan di Bandara Sydney karena berencana terbang ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Di tahun yang sama, remaja berusia 15 tahun Farhad Khalil Mohammad Jabar berkebangsaan Iran menembak Curtis Cheng selaku polisi di NSW. Pada tahun 2018, kejadian Melbourne Stabbing Attack yang dilakukan oleh Hassan Khalif Shire Ali, menusuk 3 pejalan kaki, yang akhirnya ia pun tewas setelah ditembak polisi (Misra, 2018).

Keterkaitan antara teroris, muslim, dan stigma dapat dilihat dari bagaimana masyarakat sosial disana masih banyak ditemukan yang mengecap bahwa muslim adalah teroris. Hal itu dilihat dari berbagai aksi terror yang telah banyak terjadi, kemudian menimbulkan ketakutan di masyarakat. Banyak dari masyarakat muslim mengalami ketidakadilan atas prosedur yang diberlakukan oleh pemerintah. Seperti penahanan yang sering dilakukan pada saat mereka sedang ada di bandara, stasiun bawah tanah, atau area umum lainnya. Ketika kecurigaan polisi atau pihak yang berwajib terhadap mereka yang identik dengan simbol Islam, seperti mengenakan hijab dan pakaian burka untuk pria (Hartley & Faris, 2020). Selebihnya lagi, pemerintah di masa Tony Abbott dan Malcolm Turnbull telah memberikan kekuasaan lebih bagi pihak berwajib seperti intelligen dan polisi untuk melakukan penahanan secara langsung (Hutchens, n.d.). Di klaim bahwa, kebanyakan Muslim setelah mengalami hal tersebut, mereka sering di cap sebagai teroris oleh lingkungannya. Jika dilihat dari sisi procedural justice theory, hal ini akan memunculkan ketidakadilan di saat suatu prosedur dan pihak keamanan yang menjalankan prosedur tersebut, justru memperlakukan suatu kaum yang dilihat tidak adil (Murphy et al., 2020).

Pada penelitian kali ini akan melihat bagaimana stigma yang muncul terhadap minoritas Muslim di Australia terjadi. Dikarenakan adanya prosedur pemerintah di akhir masa pemerintahan Tonny Abbott yang mengeluarkan Counter Violence Extrimism Strategi, dan mengeluarkan dana sebesar 630 miliar Dollar untuk tahun 2014-2018. Strategi dan aturan ini masih berlanjut hingga masa pemerintahan Malcolm Turnbull (Misra, 2018). Menurut beberapa penelitian sebelumnya, hal itu justru memberikan kuasa yang lebih banyak bagi pihak kepolisian dan keamanan setempat untuk melakukan penahanan. Bahkan, di masa pemerintahan Turnbull, penahanan terhadap tersangka ditambahkan menjadi 14 hari (Massola, 2017). Hal tersebut justru membuat banyak bagian masyarakat khususnya Muslim mengeluh, ketika mereka justru tidak memiliki hak untuk memanggil pengacara atau didampingi keluarga ketika ditahan. Kebanyakan dari mereka ditahan akibat

berbagai kecurigaan departemen keamanan negara, yang memiliki stigma bahwa Islam adalah teroris. Dilihat dari symbol islam yang digunakannya seperti burka, hijab, dan atribut muslim lainnya. Disinyalir memunculkan stigma teroris terhadap islam, dan justru memarginalkan atau mendiskriminasikan kaum tersebut (Murphy et al., 2020). Menurut teori procedural justice, setiap individual memiliki hak untuk bereaksi terhadap ketidakadilan tersebut. Untuk melihat apakah prosedur dan tindakan otoritas telah memenuhi keadilan yang diharapkan dan sesuai dengan nilai dari setiap agama, ras, atau kultur masyarakat. Maka dari itu, pertanyaan penelitian untuk kajian ini adalah bagaimana stigmatisasi dapat mengarah pada marginalisasi terhadap komunitas Muslim di Australia? Yang akan dijawab menggunakan teori procedural justice, untuk menganalisis apakah stigma tersebut memang dialami oleh kebanyakan muslim disana, dan Apa yang membuat mereka merasa termarginalkan?

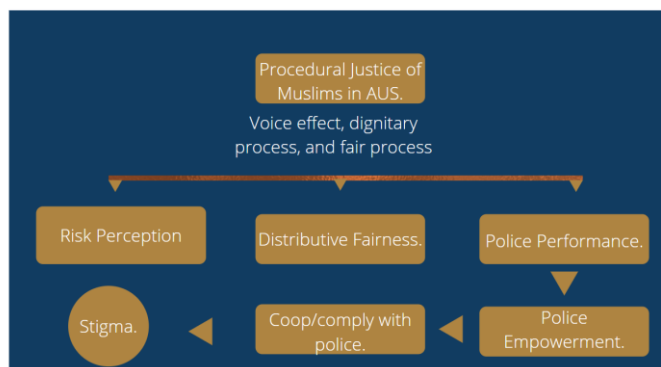


Figure 1 Teori Procedural Justice dan stigma teroris terhadap minoritas Islam di Australia.

Untuk melihat bahwa suatu peraturan pemerintah atau prosedur yang dijalankan oleh negara untuk tujuan tertentu itu adil, dapat dilihat menggunakan teori procedural justice. Pada penelitian kali ini akan melihat bahwa, prosedur yang digunakan pemerintah Australia untuk menekankan dan mengamankan negara dari aksi terror terlihat kurang adil terhadap minoritas Muslim disana. Banyak dari mereka yang masih mengalami ketidakadilan, bias, dan memperlakukan masyarakat dengan berbeda. Ketika pihak keamanan setempat seperti polisi, intelligence, dan tantara sering kali memiliki stigma negatif terhadap kaum Muslim, termasuk juga beberapa masyarakat disana yang menjadi mayoritas Kristen (Arifin et al., 2019).

Teori ini melihat bagaimana suatu individu atau kelompok dalam sosial masyarakat mencoba untuk memahami, bagaimana aktivitas yang mereka lakukan dan juga orang di sekitarnya memberikan efek terhadap hubungan sosial di masyarakat. Termasuk untuk melihat keadilan dari keputusan dibuatnya suatu prosedur terhadap komunitas tertentu. Yang dipercaya jika prosedur tersebut adil dapat dilihat dari bagaimana prosedur yang diberlakukan dapat menghargai harga diri setiap subjeknya. Bagaimana yang berwenang

mempergunakan atau menjalankan prosedur tersebut sesuai etiknya dan tanpa adanya bias (Lind & Earley, 1992). Di dalam teori ini terdapat tiga kategori utama untuk mencerminkan perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh prosedur yang berlaku. Pertama, the voice effect menjelaskan tentang penguatan dan pemberlakuan dari keadilan suatu prosedur yang mempersilahkan subjeknya, untuk mendapatkan kesempatan mengekspresikan perasaan dan responnya (Tyler, 1987). Kedua, dignitary process sebagai bagian dari penguatan dan pemberlakuan dari procedural justice oleh prosedur yang diberlakukan. Untuk memperlakukan semua orang atau subjek dari prosedur tersebut dengan cara yang hormat dan memperhatikan harga diri masyarakat (Lind et al., 1990). Yang terakhir adalah fair process, menjelaskan tentang efek positif dari keadilan prosedur yang dievaluasi dari hasil penerapan prosedur tersebut. Mengedepankan penguatan pemenuhan yang diputuskan atas dasar prosedur yang dilihat adil (Lind & Earley, 1992).

Untuk digunakan dalam penelitian, teori ini akan melihat bagaimana stigma yang muncul di masyarakat, terhadap minoritas Muslim di Australia yang kerap dikaitkan dengan teroris akan dilihat dari pandangan procedural justice. Muslim disana masih banyak yang mengalami ketidakadilan, ketika mereka tiba-tiba saja ditahan oleh pihak keamanan setempat karena kecurigaan yang muncul terhadap identitas Islam mereka (Arifin et al., 2019). Bahkan, kebanyakan dari mereka juga memilih untuk berdiam tanpa mengeluarkan unek-uneknya terhadap pemerintah. Yang jika dilakukan, mereka merasa takut akan dianggap sebagai teroris (Birt, 2006).

METODE PENELITIAN

Untuk melakukan penelitian tentang procedural justice dalam kasus stigma teroris terhadap komunitas Muslim di Australia, penelitian ini akan dilakukan menggunakan metodologi kualitatif. Dalam metode penelitian kualitatif, data yang akan digunakan adalah dengan mengumpulkan data empiris, studi kasus, interview, observasi, sejarah, serta teks visual dan tidak menggunakan suatu bentuk bilangan (Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, 2000). Metode ini juga digunakan tanpa memanipulasi variable, serta data yang didapatkan juga berasal dari hasil interview, dokumen, jurnal, publikasi, hasil observasi, dan e-book (Setyo Mulyadi, Heru Basuki, dan Hendro Prabowo, 2020). Untuk itu, penulis akan menggunakan metode kualitatif dikarenakan data yang digunakan untuk melakukan penelitian berasal dari dokumen resmi, jurnal, e-book, dan publikasi. Metode ini juga mendukung untuk digunakan pada penelitian ini untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terdapat pada jurnal ini. Hasil Analisa juga bisa didapatkan berdasarkan proses triangulasi dan analisis data dari beberapa sumber yang telah ada untuk mendapatkan kesimpulan dan jawaban yang akan dielaborasi.

Analisa tentang procedural justice dalam stigma teroris terhadap komunitas Muslim di Australia, tentu merupakan salah satu kasus yang penting untuk di bahas dalam ruang lingkup Hubungan Internasional. Khususnya, untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana pemerintah Australia memberikan stigma kepada mereka kaum Muslim sebagai minoritas di negara tersebut. Stigma anti-imigran yang marak terjadi di sana, menjadikan kaum Muslim sebagai target atas stigma negatif khususnya terhadap imigran muslim. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih luas dan lebih mendalam tentang bagaimana stigma tersebut bisa terbentuk, khususnya setelah kejadian 9/11 di tahun 2001.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Muslim Sebagai Bagian dari Kaum Minoritas di Australia

Kedatangan imigran Muslim ke Australia bisa dilihat di mulai dari era 90-an. Didirikannya Australia Commonwealth dan White Australia Policy di tahun 1901 menjadi awal dari berkurangnya imigran Muslim yang datang. Adanya aturan Immigration Restriction Act, membuat Muslim yang datang dari Timur Tengah ke Australia semakin sedikit (Arifin et al., 2019). Kebanyakan dari mereka mengalami kesulitan untuk mengajukan kependudukan mereka atau mendapatkan visa. Pemerintah mengklaim bahwa, hal ini dilakukan untuk menjaga homogenitas dari kultur Australia dan kepentingan negaranya. Mengingat mereka sedang ikut serta untuk melawan aksi terror di Timur Tengah (Mansouri, 2005). Tidak jarang, banyak komunitas muslim yang dikembalikan ke negara asalnya (Harris & Lam, 2019). Terlepas dari kendala ini, Muslim di Australia juga selalu merasa bahagia dan mendapatkan kebebasan untuk menjalankan agama dan kulturenya. Meskipun, mereka sering kali mendapatkan rasisme, diskriminasi, dan stereotip dari lingkungan sekitarnya dan para elit atas tuduhan atau stigma teroris (Arifin et al., 2019).

Kejadian 9/11 di tahun 2001 menjadi bagian penting bagi sejarah terorisme, membuatnya menjadi cambuk bagi ancaman terorisme. Kejadian tersebut memberikan dampak bagi para pencari suaka yang berdatangan ke negara barat dan kebanyakan dari mereka beragama islam (Lewis et al., 2019). Meskipun, target utama dari anti migrasi ini bukan dikhususkan bagi Muslim, tetapi memicu antipati dari migran non-eropa termasuk muslim yang di marginalisasikan. Mereka dianggap sangat berpotensi menjadi teroris setelah kejadian 9/11, menimbulkan tumbuhnya anti-Muslim diantara banyak masyarakat Australia (Cherney & Murphy, 2016a). Meskipun, pemerintah disana mendukung dan mentolerir keberadaan umat muslim yang berada di negara barat .

Stigma teroris terhadap Islam menjadi isu tersendiri di banyak negara barat, meskipun banyak dari masyarakat barat yang menghargai dan menghormati keberadaannya termasuk di (Murphy et al., 2020) Australia. Namun, berbagai kejadian terror

penting seperti Paris Attack, London Attack, dan Lindt Café siege yang terjadi di Australia menjadi pemicu tersendiri dari stigma tersebut (Porter & Kebell, 2011). Meskipun, bagi penegak keamanan, hal ini cukup sulit untuk dicegah agar tidak terjadi. Mereka juga berusaha untuk mendekatkan diri dengan komunitas Muslim termasuk Julie Bishop mantan Menteri Luar Negeri Australia yang menyatakan bahwa *Muslim families are the front line of defense*. Meskipun, kebanyakan dari komunitas muslim memilih untuk tidak ikut berkontribusi karena merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil oleh masyarakat, penegak hukum, dan keamanan di negara barat (Murphy et al., 2020). Pemerintah dan penegak hukum serta keamanan memang mencoba untuk mendekatkan diri dengan komunitas Muslim di Australia. Akan tetapi, banyak dari mereka yang merasa menjadi target dari aturan terhadap counter terrorism law dan ditingkatkannya kekuasaan bagi polisi untuk bertindak (Cherney & Murphy, 2016b). Seperti, ditingkatkannya kekuasaan polisi dan intel untuk melakukan penahanan tanpa banding atau percobaan, yang menjadikan mereka sebagai ancaman bagi keamanan. Termasuk menyadap dan mengumpulkan informasi tentang suspek. Bahkan, kebanyakan dari mereka menjadi target dari pencarian di beberapa tempat umum seperti bandara, stasiun, jalan raya, bahkan penangkapan Muslim di area public (Blackwood et al., 2013). Mereka banyak dilaporkan karena dianggap mencurigakan terhadap penegak hukum anti-terror. Sebagian dari mereka merasa menjadi target dan mendapat stigma bahkan dicurigai oleh lingkungan sekitarnya, media, bahkan polisi yang menyebabkan stigma ini terjadi dan memarginaliasikannya (Blackwood et al., 2013).

Prosedur dan Anti-Terror Law di Australia 2014-2018

Di tahun 2014, pada akhir masa jabatannya Perdana Menteri Tony Abbott mengeluarkan dana sebesar 630 juta untuk menegakan CVE program mulai dari tahun 2014-2018. Memberikan akses terhadap agensi keamanan negara untuk meningkatkan kekuatan counter-terrorism-nya, berfokus terhadap pemberantasan Home Growth Terrorist dan Leaderless Jihadist (Latika Bourke & James Massola, 2014). Maka dari itu, pada masa pemerintahan Malcolm Turnbull, penegakan anti-terror semakin dikuatkan lagi. Membuat prosedur crowded places partnership, yang digunakan untuk memberantas aksi terror. Selain itu, Turnbull juga mendapatkan dukungan dari partai oposisi atas aksinya untuk melakukan enkripsi pesan dan melakukan investigasi terhadap suspek oleh intel (Baxendale, 2017). Bahkan, pemerintahan ini meningkatkan masa penahanan hingga 14 hari tanpa percobaan. Suspek langsung menjalankan proses interogasi oleh intelligence setempat, pihak kepolisian dan badan keamanan lainnya pun mendapatkan kekuasaan tambahan untuk langsung melakukan penahanan terhadap suspek jika menunjukkan perilaku yang mencurigakan (Karp, 2017).

Kekuasaan yang diberikan terhadap penegak hukum dan keamanan di negara ini menimbulkan efek tersendiri bagi minoritas Muslim disana. Anti-terror law yang membolehkan prosedur bagi penegak keamanan untuk melakukan penahanan, sering kali menimbulkan ketidakadilan bagi komunitas Muslim. Mereka sering menjadi target pencarian, bahkan menimbulkan stigma bahwa mereka menunjukkan kecurigaan bagi polisi penahanan bahkan interogasi (Blackwood et al., 2013). Tanpa disadari, hal ini justru membuat banyak komunitas Muslim disana enggan untuk berkontribusi dalam menegakan prosedur tersebut. Khususnya, untuk membantu pemerintah dan penegak keamanan dalam melaporkan kecurigaan aksi teroris (Breen-Smyth, 2014).

Stigma: Procedural Justice dan Implementasinya Terhadap Minoritas Muslim di Australia

Makna terpenting dari procedural justice adalah, ketika pemerintah dapat dijadikan sebagai badan yang dipercaya, bertindak dengan netral, hormat, dan memberikan kesempatan yang sama bagi warganya untuk menyampaikan pemikirannya terhadap prosedur yang diberlakukan, sebelum semuanya dibuat dan dimunculkan. Semua ini bisa didapatkan berdasarkan pengalaman pribadi seseorang atau subjek aturan tersebut dengan pihak pemerintah, atau juga dengan berbagi pengalaman di lingkungan sosial tertentu (Murphy et al., 2020). Ketika pemerintah berusaha untuk mengajak masyarakat Muslim bekerjasama untuk membrantas terorisme, dengan cara melaporkan perilaku mencurigakan. Muslim disana banyak yang merasa jika mereka hanya akan melakukannya kalau pemerintah siap untuk memperlakukan mereka termasuk polisi dengan prosedur yang adil. Tidak ada lagi stigma atau tuduhan bahwa Islam berpotensi menjadi teroris atau menjadi target pencarian di tempat umum, hingga penahanan yang sering terjadi tanpa alasan karena adanya kecurigaan terhadap Muslim (Murphy et al., 2020).

Setiap individual merasa procedural justice sangat penting untuk dilakukan oleh otoritas, yang bisa memberikan kejelasan tentang status mereka di lingkungan sosial dan derajat mereka untuk berinteraksi dengan komunitas sosial lain. Muslim di Australia membutuhkan pengakuan berdasarkan prosedur yang adil, untuk melihat bahwa nilai yang mereka miliki dan budayanya diakui oleh pemerintah dilihat dari cara otoritas keamanan memperlakukannya termasuk polisi (Murphy et al., 2020). Stigma yang muncul di masyarakat dan polisi sebagai otoritas keamanan dan dirasakan oleh minoritas Muslim disana, akan merasa sensitif jika diperlakukan dengan tidak adil. Memberikan ancaman bagi statusnya, merasa tidak diperlakukan dengan baik, adil, dan kurang ingin berkontribusi dengan pihak berwajib karena tidak memiliki keadilan dari procedural justice (Herian et al., 2012).

Stigma yang muncul terhadap Islam sejak melonjaknya kasus terror pasca 9/11 menjadi ancaman tersendiri bagi kaum Muslim yang tinggal di lingkungan barat termasuk Australia. Mereka merasa lebih sensitif terhadap perlakuan pemerintah yang seharusnya mengedepankan procedural justice, meskipun banyak dari negara barat memperketat strategi dan hukum counter-terrorism-nya. Pengalaman mereka atas Islamophobia, diskriminasi, dan kejahatan kebencian masih terjadi (Kaplan, 2006). Mereka merasa bahwa pihak otoritas dan kepolisian tidak merepresentasikan kepentingan Islam, menjadikan polisi sebagai ancaman bagi keamanan komunitasnya. Polisi seharusnya dapat bertindak sesuai dengan procedural justice, dengan cara menghormati adat dan budaya Muslim di Australia tanpa memiliki kecurigaan terhadap Islam yang identic dengan teroris. Yang intinya, rasisme untuk melihat target berdasarkan penampilannya seperti pakaian yang dikenakan muslim, adalah salah satu bentuk ketidak amanan bagi Muslim yang dilihat sangat bias (Murphy et al., 2020). Tentunya, dengan memperlakukan keadilan dan procedural justice bagi Muslim di Australia, akan memberikan dampak yang positif bagi pemerintah dan penegak hukum. Agar aturan yang dijalankan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat tanpa adanya ketidakadilan dan bias.

SIMPULAN

Untuk menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan analisis diatas tentang adanya stigma terhadap Muslim yang lekat dengan tuduhan terorisme, dapat memunculkan suatu bentuk marginalisasi yang dirasakan oleh kebanyakan Muslim disana. Marginalisasi itu terjadi berdasarkan stigma yang terjadi terhadap Muslim oleh lingkungan sosial dan polisi sebagai penegak prosedur yang dijalankan oleh pemerintah. Hal itu terjadi karena beberapa aksi terror di negara Australia, yang kebanyakan pelakunya adalah Islam dan berasal dari Timur Tengah. Stigma yang mengarah pada marginalisasi, dapat dilihat dari bagaimana kebanyakan komunitas Muslim sebagai kaum minoritas memilih untuk tidak menyampaikan pendapatnya jika memiliki ketidaksetujuan terhadap pemerintah. Polisi disana yang menegakan Counter-Terrorism law, masih cenderung menganggap value dari Islam seperti pakaian yang dikenakannya sebagai bagian dari perilaku yang mencurigakan. Sebenarnya, untuk pihak kepolisian, procedural justice sangat penting untuk diberlakukan yang bisa membentuk pandangan lebih positif bagi komunitas Islam terhadap perilaku yang dimunculkan polisi. Intinya, persepsi Muslim terhadap procedural justice dapat menimbulkan rasa tidak aman atas stigma yang dimunculkan oleh pihak kepolisian dan badan otoritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S., Bachtiar, H., Fuad, A. N., Tongat, T., & Wahyudi, W. (2019). Minority Muslims and freedom of religion: learning from Australian Muslims' experiences. *Indonesia Journal of Islam and Muslim Societies*, 8(2).
- Baxendale, R. (2017). Laws could Force Companies to Unlock Encrypted Messages of Terrorists. *The Australian*.
- BBC News. (2014). Retrieved from Sydney siege: Hostages held in Lindt cafe. <https://www.bbc.com/news/world-australia-30473983>
- Birt, J. (2006). Good imam, bad imam: Civic religion and national integration in Britain post - 9/11. *The Muslim World*, 96(4), 687–705.
- Blackwood, L., Hopkins, N., & Reicher, S. (2013). Turning the analytic gaze on "us." *European Psychologist*.
- Breen-Smyth, M. (2014). Theorising the "suspect community": Counterterrorism, security practices and the public imagination. *Critical Studies on Terrorism*, 7(2), 223–240.
- Cherney, A., & Murphy, K. (2016a). Being a 'suspect community' in a post 9/11 world—The impact of the war on terror on Muslim communities in Australia. *Australian & New Zealand Journal of Criminology*, 49(4), 480–496.
- Cherney, A., & Murphy, K. (2016b). What does it mean to be a moderate Muslim in the war on terror? Muslim interpretations and reactions. *Critical Studies on Terrorism*, 9(2), 159–181.
- Harris, A., & Lam, K. (2019). Youth participation in 'post - secular'times: young Muslim and Buddhist practitioners as religious citizens. *The British Journal of Sociology*, 70(2), 627–646.
- Hartley, J., & Faris, N. (2020). Leadership legitimacy and a conundrum of justice between police and Muslim organizations in a climate of counter-terrorism within Australia. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 40(4), 635–649.
- Herian, M. N., Hamm, J. A., Tomkins, A. J., & Pytlik Zillig, L. M. (2012). Public participation, procedural fairness, and evaluations of local governance: The moderating role of uncertainty. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(4), 815–840.
- Hutchens, G. (n.d.). Retrieved from Malcolm Turnbull to give defence force greater powers to respond to terrorism. 2017. <https://www.theguardian.com/australia-news/2017/jul/17/malcolm-turnbull-to-give-defence-force-greater-powers-to-respond-to-terrorism>
- Kaplan, J. (2006). Islamophobia in America?: September 11 and Islamophobic hate crime. *Terrorism and Political Violence*, 18(1), 1–33.
- Karp, P. (2017). *The Guardian*. Retrieved from Turnbull Defends Proposed Anti-Terrorism

- Laws as Constitutional.* <https://www.theguardian.com/australia-news/2017/oct/04/turnbull-defends-proposed-anti-terrorism-laws-as-constitutional>
- Latika Bourke, & James Massola. (2014). *The Sydney Morning Herald*. Retrieved from *Tony Abbott boosts funding by \$630m to fight home-grown terrorism.* <https://www.smh.com.au/politics/federal/tony-abbott-boosts-funding-by-630m-to-fight-home-grown-terrorism-20140805-3d6mx.html>
- Lewis, J., Pond, P., Cameron, R., & Lewis, B. (2019). Social cohesion, Twitter and far-right politics in Australia: Diversity in the democratic mediasphere. *European Journal of Cultural Studies*, 22(5–6), 958–978.
- Lind, E. A., & Earley, P. C. (1992). Procedural justice and culture. *International Journal of Psychology*, 27(2), 227–242.
- Lind, E. A., Kanfer, R., & Earley, P. C. (1990). Voice, control, and procedural justice: Instrumental and noninstrumental concerns in fairness judgments. *Journal of Personality and Social Psychology*, 59(5), 952.
- Mansouri, F. (2005). *Citizenship, identity and belonging in contemporary Australia.*
- Massola, J. (2017). *The Sydney Morning Herald*. Retrieved from *Malcolm Turnbull Pushes for Law to Detain Terror Suspect for up to 14 Days Before Charged.* <https://www.smh.com.au/politics/federal/malcolm-turnbull-pushes-for-law-to-detain-terror-s>
- McCulloch, J. (2003). 'Counter-terrorism', human security and globalisation—from welfare to warfare state? *Current Issues in Criminal Justice*, 14(3), 283–298.
- Misra, A. (2018). Australia's counter-terrorism policies since September 11, 2001: Harmonising national security, independent oversight and individual liberties. *Strategic Analysis*, 42(2), 103–118.
- Murphy, K., Madon, N. S., & Cherney, A. (2020). Reporting threats of terrorism: Stigmatisation, procedural justice and policing Muslims in Australia. *Policing and Society*, 30(4), 361–377.
- Nations, U. (1948). Retrieved from *The Universal Declaration of Human Rights.* <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Porter, L. E., & Kebell, M. R. (2011). Radicalization in Australia: Examining Australia's convicted terrorists. *Psychiatry, Psychology and Law*, 18(2), 212–231.
- Tyler, T. R. (1987). Conditions leading to value-expressive effects in judgments of procedural justice: A test of four models. *Journal of Personality and Social Psychology*, 52(2), 333.